



Buletin Parlementaria

Nomor 1204/IV/VI/2022 • Juni 2022



KICKOFF MEETING P20 Surabaya, 15 June 2022



Menuju P20, DPR Ajak Negara G20 Selamatkan Dunia dari Krisis Global



3 Rachmat Gobel Minta
Pemerintah Segera
Tanggulangi Penyakit
Mulut dan Kuku



22 BAKN DPR Harap
Penerimaan Negara
dari Cukai Dapat
Lebih Optimal



9 772614 339005

Menuju P20, DPR Ajak Negara G20 Selamatkan Dunia dari Krisis Global



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menjadi *keynote speaker* dalam 'Kickoff Meeting G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)' di Surabaya. Foto: Bonis/rvi

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak negara-negara anggota G20 bekerja sama menyelesaikan berbagai krisis yang tengah dihadapi dunia. Hal itu ia sampaikan saat menjadi *keynote speaker* dalam 'Kickoff Meeting G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)' di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/6).

Kickoff Meeting P20 ini merupakan pembukaan atas serangkaian pertemuan jelang P20 Summit pada 6-7 Oktober mendatang. DPR menjadi tuan rumah the 8th P20 Summit yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di mana Indonesia tahun

ini menjadi presidensi dalam forum multilateral itu.

"Presidensi Indonesia pada G20 dibayangi oleh berbagai krisis (multiple crisis), yang terjadi pada saat bersamaan. Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia," kata Puan. Ia pun mengingatkan betapa mudahnya masalah lokal berkembang menjadi krisis global yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat di berbagai negara.

Oleh karena itu, kata Puan, negara-negara G20 harus selalu memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis global dalam pembuatan kebijakan di dalam negeri. "Jelaslah bahwa saat ini segala

masalah dunia kita saling berhubungan. Berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja," ucapnya.

Puan mengatakan, dibutuhkan kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong antar negara berupa kerjasama internasional. Selain itu juga dibutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholder* lintas bidang, khususnya dalam sektor keamanan, politik, ekonomi, dan sosial.

"Setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi risiko ancaman krisis. Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong antar negara diharapkan dapat meningkatkan daya respons setiap negara untuk menanggulangi permasalahan global," urai Puan. ■ aha



Rachmat Gobel Minta Pemerintah Tanggulangi PMK



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima perwakilan PPSKI. Foto: Azka/nvl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk segera menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kini sedang melanda hewan ternak milik rakyat. Gobel mengatakan, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar yang dimiliki.

“Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri. Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga,” kata Gobel saat menerima Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) drh Nanang Purus Subendro dan Bendahara Umum PPSKI Yudi Arif, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).

Gobel mengingatkan, kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan indikator tersendiri dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternaknya mati atau harganya jatuh, maka keluarga peternak tersebut menjadi langsung jatuh miskin. “Jadi jangan meremehkan masalah (PMK) ini,” tegas Gobel.

Serangan PMK, lanjut politisi Partai Nasdem tersebut, juga sangat memukul upaya pemerintah untuk mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. “Serangan PMK ini tentu akan makin menyulitkan upaya kedaulatan pangan daging sapi. Kejadian ini merupakan bentuk kesembroan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi,” dorong legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo tersebut. ■ azk/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pembertinaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Aldhillah, Geraldii Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savanti Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Christina Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Paripurna DPR Tetapkan Tiga Nama Calon Anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima laporan dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Rapat Paripurna DPR RI terkait calon Anggota DKPP. Foto: Kresno/mvl

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus menyetujui tiga orang calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Masa Tugas tahun 2022-2027, yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI dalam laporan yang dibacakan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI

Ahmad Doli Kurnia Tandjung di depan Rapat Paripurna.

“Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI, kami dapat laporkan rangkaian kegiatan usulan calon anggota DKPP Masa tugas 2022 - 2027 oleh Komisi II DPR RI sebagai berikut, pada tanggal 13 Juni 2022, Komisi II DPR RI melakukan rapat internal memulai pembicaraan awal mengenai usulan 3 orang calon

keanggotaan di KPP masa tugas 2022-2007 dan disepakati bahwa masing-masing fraksi mengusulkan nama bakal calon anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat atau akademisi yang memahami penyelenggaraan, pengawasan, dan etika penyelenggara Pemilu,” jelas Doli dalam Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Pada 13 Juni 2022, lanjut Doli, juga dilaksanakan rapat pimpinan dan Kapoksi Komisi II DPR RI, sekaligus memutuskan secara musyawarah dan mufakat tiga calon anggota DKPP yang selanjutnya dilaporkan pada rapat intern Komisi II DPR RI. Dalam rapat intern Komisi II DPR RI dengan agenda laporan hasil keputusan rapat pimpinan dan Kapoksi yang telah memutuskan tiga calon anggota DKPP. Ketiga calon anggota DKPP tersebut adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah.

“Demikian laporan Komisi II DPR RI mengenai pembahasan usulan tiga nama calon anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027. Mohon berkenan Rapat Paripurna DPR RI kiranya dapat menetapkan dan menyetujui ketiga orang calon anggota DKPP usul DPR RI tersebut, dan selanjutnya disampaikan kepada presiden agar dapat ditetapkan sebagai anggota DKPP masa tugas 2022-2027,” lapor politisi Partai Golkar itu di hadapan Rapat Paripurna.

Usai Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan laporan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan pemilihan tiga calon anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027, Pimpinan Rapat Paripurna pun meminta persetujuan kepada anggota Rapat Paripurna, baik yang hadir secara langsung maupun virtual apakah menerima dan menyetujui hasil laporan Komisi II DPR RI tersebut atau tidak. Pertanyaan itu disambut jawaban ‘setuju’ dari peserta Rapat Paripurna, sehingga dapat menetapkan ketiga nama tersebut menjadi calon anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027 usulan DPR, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. ■ ayu/sf

DPR Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK



Pimpinan DPR RI foto bersama Pimpinan BPK RI usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Foto: Tim/nvi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Dalam paparannya, Isma menyampaikan realisasi belanja negara dan hibah mencapai Rp2.011,34 triliun atau 115 persen dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2021 sebesar Rp1.743,64 triliun.

“Realisasi pendapatan dan hibah tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan senilai Rp1.547,84 triliun dari Rp1.444,54 triliun; realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp458,49 triliun dari target Rp298,20; dan realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp5,01 triliun dari target senilai Rp0,9 triliun,” ungkap Isma dalam laporannya di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Isma juga melaporkan realisasi belanja negara Tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021 senilai Rp2.750,03 triliun. “Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 2.000,70 triliun; realisasi transfer ke daerah sebesar Rp713,85 dan realisasi dana desa sebesar Rp71,85,” lanjut Isma di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.

Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146 persen dari anggaran, realisasi belanja subsidi sebesar 138 persen dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108 persen dari anggaran. Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja negara tersebut, maka realisasi Defisit Anggaran Tahun 2021 senilai Rp775,06 triliun atau 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021.

Realisasi Defisit Anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih

rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB. Selain itu, realisasi defisit anggaran Tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran Tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen dari PDB. Sementara, terkait Pembiayaan Tahun 2021, pemerintah melaporkan Realisasi Pembiayaan senilai Rp871,72 triliun atau 87 persen dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan.

Realisasi tersebut terdiri dari Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri senilai Rp881,62 triliun dan Realisasi Pembiayaan Luar Negeri senilai minus Rp9,91 triliun. Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri sebagian besar berasal dari Surat Berharga dan Pinjaman Dalam Negeri serta penggunaan Rekening Pemerintah-Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sementara Realisasi Pembiayaan Luar Negeri yang minus Rp9,91 triliun, sebagian besar disebabkan oleh Realisasi Pembayaran Pokok Cicilan Utang Luar Negeri yang melebihi Realisasi Penarikan Pinjaman. ■ rnm/sf

Penguatan *Local Wisdom* Dinilai Penting Masuk pada Pembahasan RUU Penyiaran

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai baik adanya masukan terkait penguatan *local wisdom* atau kearifan lokal untuk turut masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Diharapkan dengan adanya masukan tersebut, bisa menambah tayangan program yang baik, sehingga dapat meningkatkan jumlah penonton dengan tayangan televisi yang berkualitas kedepannya.

Demikian diungkapkan Utut usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Ketua Dewan

”

TVRI, RRI ATAU TELEVISI SWASTA, DIHARAPKAN PENONTON TELEVISI, PENDENGAR RADIO DAPAT MENERIMA BANYAK MANFAATNYA.

Pengawas LPP TVRI, Kepala Stasiun TVRI Aceh, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI, Kepala Balai Monitor

Sistem Frekwensi Radio (SFR), KPID, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), di Kantor TVRI Provinsi Aceh, Sabtu, (11/6).

“Saya menilai adanya masukan terkait penguatan program *local wisdom* atau program yang mengedepankan kearifan lokal sangat baik dan saya setuju. Pasalnya dengan adanya program-program berkualitas (di stasiun televisi) akan meningkatkan jumlah penonton, sehingga *rating* dari pada penyiaran akan naik,” harap Utut.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan, dengan adanya program atau tayangan yang berkualitas dari pelaku penyiaran kedepannya, baik TVRI, RRI atau televisi swasta, diharapkan penonton televisi, pendengar radio dapat menerima banyak manfaatnya. Sehingga *rating* dari pada penyiaran tersebut akan naik, dan parameter keberhasilan akan terlihat nyata.

“RUU (Penyiaran) akan berhasil apabila bermanfaat bagi penonton atau pendengar. Bisa kita lihat dari jumlah atau *rating*, seberapa banyak publik melihat atau mendengar tayangan sebuah program. Parameter atau ukuran dari keberhasilan sebuah penyiaran, akan terlihat dari pada jumlah iklan yang masuk. Apabila banyak acara TV atau program radio yang berkualitas. *Rating* akan tinggi dan pemirsa yang menyaksikan program yang baik tidak hanya sekadar menonton, namun mendapatkan manfaat dari pada siaran tersebut,” jelas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Diketahui RUU tentang Penyiaran saat ini telah masuk dalam daftar Prolegnas sebagai RUU Prioritas Tahun 2022, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Desember 2021 menjadi usul inisiatif Komisi I DPR RI. Turut hadir dalam RDP ini sejumlah Anggota Komisi I DPR RI di antaranya Dave Akbarshah Fikarno, Cristina Aryani, Nurul Arifin, Rachel Maryam Sayidina, Fadhlullah, Hasbi Anshory, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Sukamta, Almuzzammil Yusuf, dan Alimin Abdullah. ■ rni/sf



Foto bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan jajaran LPP TVRI Aceh, RRI Aceh, KPID Aceh dan pihak terkait lainnya di Kantor TVRI Aceh. Foto: Runi/rml

Komisi I Soroti Tingginya Harga Sewa Saluran Digital TV Lokal di Maluku Utara



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono. Foto: Nadya/rnvl

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan tujuan Komisi I DPR RI

menyerap aspirasi dan masukan terkait RUU Penyiaran ke Provinsi Maluku Utara adalah untuk memastikan dan mensinkronkan informasi di pusat dengan realisasi di lapangan. Bambang menjelaskan temuan yang didapat Komisi I DPR RI di Maluku Utara terkait kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan daerah, salah satunya terkait keinginan pemerintah untuk melakukan penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat penyewaan *channel* atau saluran TV digital kepada stasiun TV lokal dengan harga yang tidak memberatkan stasiun TV lokal.

“Saya kira yang paling penting supaya apa yang kita hasilkan nanti betul-betul menghasilkan produk yang maksimal, produk yang bisa diterima oleh semua kalangan dari atas sampai ke bawah, dan menyisir banyak pihak. Sehingga kontroversi yang mungkin timbul setelah RUU (Penyiaran) itu kita undang, itu bisa kita minimalis (permasalahan),” kata Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan LPP RRI, TVRI, Loka Monitoring, KPID dan Gamalama TV, guna menyerap masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)

tentang Penyiaran, dengan tema ‘Tantangan Penyiaran Multiplatform di Indonesia’, di Ternate, Maluku Utara, Jumat (10/6).

“Di daerah, mereka (stasiun TV lokal) menjerit. Sehingga dengan dua kondisi yang berbeda ini kita harus mencari jalan tengah, artinya supaya PNBP tetap jalan, tetapi di bawahpun tidak merasa *kayak* terdzholimi. Kan mereka (stasiun TV lokal) teriak ini mahal, kita bisa mati. Yang kita dengar kan begitu. Kita *enggak* mampu, lama-lama kita akan berhenti akan mati, dan sebagainya. Supaya dua hal ini bisa sinkron bisa saling mendukung kita harus mencari jalan tengah, jalan tengahnya ini adalah yang nantinya akan kita diskusikan dengan instansi-instansi terkait. Supaya semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh semua pihak, tidak hanya di satu pihak,” tandas politisi Gerindra itu.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Junico Bp Siahaan menyatakan bahwa keinginan pemerintah untuk menghasilkan PNBP dengan memberikan tarif yang tinggi kepada TV lokal terkait penyewaan *channel* atau saluran TV digital sangatlah tidak adil. Menurutnya, TVRI janganlah menjadi TV kapitalis yang bertugas

menghasilkan pendapatan, yang dimana itu di luar tugas pokok dan fungsinya. “Teman-teman TV lokal, mereka berapa *sih* iklannya? Sementara biayanya hampir sama, nilai iklan *enggak* banyak, jumlahnya *enggak* banyak, harganya *enggak* sama dengan Jakarta. Sementara, harga yang ditetapkan oleh pusat itu hampir sama sekitar Rp25 jutaan per bulan yang bisa menyerap Rp250 sampai Rp300 juta per tahun TV swasta. TV lokal disuruh bayar segitu. Menurut saya *enggak fair lah*,” tandas Nico.

“Boleh kita menaikkan target PNBP, tapi jangan jadi TV kapitalis. Jangan buat TVRI jadi sumber pencarian uang untuk negara. Menurut saya tidak pas di luar tupoksinya. Tetap harus ada untung supaya negara *enggak* terlalu besar defisitnya untuk membiayai TVRI karena biayanya sekitar Rp1 sampai Rp1,5 (triliun) setahun, tapi jangan jadi menyulitkan banyak pihak. Kalau di TV nasional banyak iklannya *enggak* masalah, tapi kalau *ngambil* uang PNBP dari TV lokal, saya *enggak* setuju nanti akan saya sampaikan dalam rapat,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ ndy/sf

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa perbedaan data penduduk masih menjadi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Padahal data kependudukan itu telah dimanfaatkan beberapa tahun ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Doli mengatakan bahwa puluhan tahun republik ini merdeka, namun permasalahan data kependudukan tetap belum selesai. Sejauh ini Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri sejak beberapa tahun lalu memang telah dimanfaatkan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

“Sayangnya data KTP elektronik belum terintegrasi dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data antara DP4 dengan DPT,” ungkap Doli saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR ke Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu (8/6).

Hal itu, lanjutnya, kerap menjadi masalah dalam Pemilu. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada

Perbedaan Data Penduduk Masih Jadi Masalah dalam Persiapan Pemilu

berkurangnya kualitas Pemilu dan pembangunan demokrasi Indonesia. Bahkan permasalahan data juga akan mempengaruhi pelayanan publik lainnya. Serta penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa yang sejatinya juga masih menggunakan data kependudukan.

Oleh karena itulah, tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang terdiri dari Ihsan Yunus, Cornelis, Haeny Relawati dan Irwan Ardi Hasman secara spesifik mendatangi Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk mengetahui kondisi

faktual terkait data kependudukan yang terjadi di kota tersebut, dan Kabupaten Simalungun. Sekaligus untuk mencari sistem yang tepat untuk menyelesaikan masalah data kependudukan ini.

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemutakhiran data kependudukan Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun sudah sekitar 96 persen. Masih ada 4 persen untuk menyempurnakannya, sambil mempersiapkan berbagai hal lain untuk kebutuhan pemilihan umum 2024 mendatang. ■ ayu/aha



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin kunspek Komisi II DPR RI ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Foto: Ayu/nvl

Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu Dinilai Sudah Mendapat Perhatian



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin (kanan) saat memimpin Kunspek Komisi II DPR RI. Foto: Kresno/mvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan isu yang selama ini ada di kalangan pengamat dan pemantau Pemilihan

Umum (Pemilu) terkait hak pilih penyandang disabilitas yang selalu diabaikan dan dinomorduakan dalam pesta demokrasi, kini sudah mendapat perhatian jauh lebih baik dari pemerintah dan



DATA-DATA YANG TIDAK TEREKAM DI DATA PENDUDUK POTENSI PEMILIH PEMILIHAN (DP4) PADA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DUKCAPIL), SEPERTI LANSIA, JOMPO, PENYANDANG DISABILITAS DAN SETERUSNYA YANG RENTAN TERHADAP KEMUNGKINAN TIDAK TERDATA

penyelenggara Pemilu.

“Setelah mereka (perwakilan penyandang disabilitas) datang ke Mahkamah Konstitusi, mereka harus mendapat perhatian, yang mulai saat itu perhatian kita di dukcapil terhadap mereka jauh lebih baik. Dan tadi sudah dijawab oleh (perwakilan) Kemendagri itu ada masalah, tetapi kita perhatikan,” ujar Yanuar saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/6).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mempertanyakan data-data yang tidak terekam di Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4) pada administrasi kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), seperti lansia, jompo, penyandang disabilitas dan seterusnya yang rentan terhadap kemungkinan tidak terdata untuk memiliki hak dalam pesta demokrasi.

“Sudah dijawab (oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu), bahwa itu juga sudah menjadi perhatian mereka. Sehingga itu memberikan jawaban atas beberapa kekhawatiran publik terutama para pengamat Pemilu, bahwa mereka yang tergolong rentan (tidak terdata dalam DP4) selama ini cenderung diabaikan. Cuma memang kita harus cek ulang itu,” ujar Yanuar.

Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X tersebut, karena proses Pemilu dan tahapannya sudah mulai berjalan, Komisi II DPR RI ingin cek mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian lebih besar dan lebih serius di samping hal-hal normal hal-hal yang konvensional.

“Misalnya, sejauh mana sistem itu berjalan koordinasi antara dukcapil dan KPU. Kita ketahui ternyata sistemnya sudah mulai *connected* di antara dua instansi ini. Itu tentu sesuatu yang penting untuk kita cek sejauh mana proses ini berjalan di pusat atau sampai ke kabupaten-kabupaten dan kota,” ujar Yanuar menutup pernyataannya. ■ eno/sf

Data Pemilih dan Data Kependudukan Harus Dikawal Secara Konsisten

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengungkapkan, permasalahan yang seringkali muncul di setiap ajang pemilihan umum (pemilu) adalah sinkronisasi data. Dimana, data pemilih yang ada di KPU RI seringkali tidak cocok dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ia mendorong

agar sinkronisasi di kedua lembaga tersebut dikawal secara konsisten.

“Kita memiliki SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Yang menjadi persoalan itu adalah inkonsistensi dalam *updating* datanya,” kata Syamsurizal usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, di Kantor Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (8/6). Turut hadir jajaran Forkopimda Sukoharjo, KPU dan Bawaslu Sukoharjo serta Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mencontohkan, ketika ada

masyarakat yang pindah domisili, meninggal dunia, perubahan status hak pilih setelah berusia 17 tahun maupun PNI/Polri yang sudah pensiun, semestinya secara otomatis sudah masuk ke data pemilih. “Nah, ini yang kadang-kadang tidak terpantau dengan cermat,” ucapnya mengingatkan.

Ia turut mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar merawat data kependudukan, sehingga sinkronisasi data terwujud dengan baik dan hak-hak masyarakat untuk memilih pada Pemilu 2024 kelak tetap terjaga. “Ini perlu kami sampaikan, karena pada Pemilu 2014 dan 2019, hal-hal yang sama masih terus terulang dan terjadi. Kami harapkan penyempurnaan data ini dilakukan saat Pemilu 2024,” pungkas politisi Partai Persatuan (PPP) itu.

Sementara, Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyampaikan, selama ini salah satu masalah yang dihadapi menjelang Pemilu adalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu terakhir dengan secara berkelanjutan sebagai acuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian,” ujarnya.

Dalam upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sambung Etik, Dispendukcapil Sukoharjo selalu berkoordinasi dan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Bahkan, dalam upaya *update* data kependudukan, Dispendukcapil telah membuat beberapa program jemput bola. ■ es/aha



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Sukoharjo. Foto: Erman/nvl

Komisi III Apresiasi Kinerja Polda dan Kanwil Kemenkumham Kepri



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda dan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau. Foto: Bianca/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau dan jajaran serta Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan jajaran selama arus mudik pada Idulfitri 1443 H yang lalu. Adies Kadir menilai, jajaran Polda Kepri dan Kanwil Kemenkumham Kepri telah bekerja dengan baik dalam mengamankan berbagai hal selama libur Lebaran.

“Jadi hasil rapat, bahwa pasca Lebaran, kriminalitas di Batam turun banyak sekali dari tahun lalu pasca Lebaran itu sekitar 1500-an. Jadi banyak sekali penurunan demikian juga kejahatan-kejahatan lainnya banyak menurun,” kata Adies Kadir usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kepri dan Kakanwil Kepri beserta jajaran di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (10/6).

Selain tingkat kriminalitas, Adies Kadir menyebut distribusi sembilan bahan pokok (sembako) di Kepri juga tidak mengalami permasalahan. Selain itu, permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Kepri juga dapat diatasi dengan baik. “Distribusi sembilan bahan pokok tidak ada masalah, minyak goreng juga begitu, hanya ada sedikit kemarin kelangkaan di (Kepulauan) Natuna sama Anambas, tetapi dapat diatasi dan tidak ada gejolak yang berlebihan,” imbuh Adies Kadir lebih lanjut.

Terkait imigrasi, mengingat posisi Kepri berada di perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, politisi Partai Golkar ini meminta agar proses imigrasi

dapat lebih diperketat. “Tentunya saat ini kan mulai terbuka turis-turis masuk, khususnya turis dari Singapura, Malaysia, dan China. Apalagi tenaga kerja Cina juga banyak masuk, jadi kita minta agar imigrasi lebih ketat dalam melihat dan memilih mereka mereka yang masuk ke Indonesia, sebagai *tourism* atau sebagai pekerja, itu saja,” tegas Adies.

Lebih lanjut, Polda dan Kanwil Kemkumham Kepri diharapkan dapat terus meningkatkan kerja-kerja baik yang selama ini telah dijalankan. Untuk menunjang hal tersebut, Komisi III DPR RI sendiri telah mengusulkan adanya pengadaan kapal-kapal cepat agar kepolisian Kepri dapat terus memantau dan menjaga wilayah laut Kepri. Sebab, Kepri merupakan wilayah kepulauan dengan 96 persen wilayahnya adalah perairan, dan 4 persen daratan. ■ bia/sf

Evaluasi Pengamanan Mudik, Komisi III Kunjungi Polda Sulsel

Besarnya arus mudik serta arus balik di pada hari raya Idulfitri Tahun 2022, merupakan salah satu persoalan yang menarik perhatian. Apalagi mengingat, Provinsi Sulawesi Selatan sendiri yang merupakan salah satu daerah tujuan utama mudik dan libur lebaran. Tentunya dalam hal ini Pihak Polri di wilayah Sulsel harus mengantisipasi lonjakan mudik/arus balik yang terjadi sesuai dengan rasio ideal jumlah personel dan strategi operasi yang tepat.

Hadir sebagai Ketua Tim rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam sambutannya mengatakan, Komisi III DPR RI bermaksud untuk mendapatkan penjelasan terkait evaluasi pengamanan mudik/arus balik, pemeliharaan keamanan, dan strategi pengamanan kebutuhan bahan pokok

masyarakat Indonesia pada hari raya Idulfitri Tahun 2022 lalu.

“Kunjungan Komisi III DPR RI ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan,” ungkap Pangeran dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Mapolda Sulsel, Makassar, Jumat (10/6).

Komisi III DPR RI mengevaluasi program pengamanan lebaran atau hari raya Idulfitri dari perspektif penegakan hukum yang berpengaruh terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. “Maka diperlukan persiapan dan rencana strategis sekaligus pola sinergisitas antar aparat penegak hukum dan institutisi terkait. Perhatian secara khusus

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian baik di tingkat Mabes Polri maupun di level wilayah dalam melakukan pencegahan, monitoring dan evaluasi,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Pol. Nana Sudjana memaparkan sejumlah program dan langkah-langkah operasi atau kegiatan Kepolisian yang dilakukan dalam rangka antisipasi pengamanan mudik dan arus baliknya, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban di berbagai tempat di wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan di Sulsel khususnya *akai* unjuk rasa serta perkelahian antar kampung atau antar kelompok masih menjadi dominasi.

“Untuk itu dalam hal pengamanan, saya sebagai Kapolda melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut yakni mengkoordinasikan hal ini mulai dari Gubernur, Pangdam, dan kamipun sudah mengumpulkan Forkopimda dari Kotamadya, Walikota, Kapolrestabas juga Dandim. Jadi memang dari hasil evaluasi kami, kasus ini kerap terjadi, akar masalahnya karena terlalu banyak masyarakat kita di Sulsel ini khususnya anak-anak muda itu menjadi pengangguran, tidak ada kegiatan, ditambah juga dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Maka kami bersama jajaran Forkopimda di Makassar membentuk Batalyon 120,” jelasnya. ■ tra/aha



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Foto: Tiara/nvl

Komisi VII Upayakan Penyelesaian Masalah PT SMGP dengan Warga

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke PLTP Sorik Marapi dan Wellpad T di Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Komisi VII DPR RI berupaya mencari jalan keluar permasalahan antara PT Sorik Marapi Geothermal Project (SMGP) dengan warga setempat.

Persoalannya, PT SMGP yang merupakan pengembang pada proyek PLTP Sorik Marapi, melaporkan telah terjadi semburan liar (blow out) yang diikuti dengan keluarnya gas H₂S ketika berlangsung pengeboran sumur panas bumi T-12 pada 24 April 2022.

“Melihat kondisi demikian sehingga Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan PLTP Sorik Marapi Mandailing Natal,” tandas Maman saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jumat (10/6).

Komisi VII beranggapan, semburan liar gas yang dimaksud merupakan salah satu potensi bahaya yang dapat terjadi dalam kegiatan pengeboran, sehingga prosedur dan peralatan untuk pencegahannya juga harus dipersiapkan dengan baik. Dampak dari kejadian tersebut, dilaporkan sebanyak 19 orang warga masyarakat dan 2 orang kru pengeboran terpapar gas H₂S yang keluar dari semburan liar.

Melalui kunjungan ini, Komisi VII dapat mengetahui berbagai kendala, tantangan, progres, serta perkembangan PLTP Sorik Marapi Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Komisi VII juga memberi dukungan kepada pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta akan membawa



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Kunspek Komisi II DPR RI ke PLTP Sorik Marapi dan Wellpad T di Mandailing Natal. Foto: Eko/mvl



SEMBURAN LIAR GAS YANG DIMAKSUD MERUPAKAN SALAH SATU POTENSI BAHAYA YANG DAPAT TERJADI DALAM KEGIATAN PENGEBORAN

informasi dan data terkait bidang-bidang kerja Komisi VII untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

Peristiwa demikian bukan kali pertama, tercatat sejak proyek ini dijalankan pada pertengahan tahun 2016, PLTP yang dikelola oleh PT SMGP

ini sudah mengalami empat insiden kebocoran gas dan semburan lumpur. Insiden itu dinilai mengganggu iklim investasi pada sektor energi baru terbarukan (EBT). Misalnya di tahun 2021, kebocoran gas juga pernah terjadi sampai-sampai merenggut 5 korban jiwa. Selain korban jiwa kebocoran gas juga mengakibatkan 46 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit, sebanyak tiga orang rawat jalan, dan satu orang dalam penanganan medis.

Lalu pada Maret 2022 kemarin, puluhan warga di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Mandailing Natal, Sumut kembali mengalami keracunan karena diduga terpapar gas beracun dari proyek PLTP itu. Akibat insiden ini sebanyak 58 warga Desa Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Sumatera Utara harus dilarikan ke rumah sakit. ■ eko/aha

Pemerintah Diminta Sigap Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif penanganan Covid-19 yang mulai meningkat dalam sepekan ini. Pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Pemerintah harus segera mempersiapkan sistem kesehatan dan mengambil langkah untuk menekan kasus Covid-19. Apalagi per Rabu kemarin, jumlah kasus baru naik secara signifikan yakni 1.242 kasus,” ungkap Netty dalam keterangan persnya yang diterima **Parlementaria**, Kamis (16/6).

Sebelumnya pada Selasa (14/6), tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 6.062.009 kasus, sembuh 5.900.049 kasus, dan meninggal 156.662 kasus. Netty khawatir jika Pemerintah tidak segera mengambil tindakan antisipatif, maka kasus akan terus bertambah naik.

“Disiplin prokes masyarakat sudah mulai longgar. Tempat-tempat publik kembali dibanjiri pengunjung. Pertemuan tatap muka dan mobilitas masyarakat sudah kembali seperti sebelum ada pandemi. Apa langkah yang diambil pemerintah agar masyarakat kembali waspada?” tanya Netty.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyangkan sikap pemerintah beberapa

waktu ke belakang yang cenderung memberikan kesan kepada masyarakat untuk melonggarkan prokes seperti, membolehkan membuka masker dan penurunan aktivitas testing.

“Bahkan acara besar juga sudah digelar tanpa prokes yang ketat. Pesan yang ditangkap masyarakat adalah pelonggaran, karena Covid-19 sudah landai atau bahkan hilang. Akibatnya masyarakat banyak yang tidak waspada dan cenderung mengabaikan prokes,” kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Komunikasi publik yang disalahpahami masyarakat ini bahkan, kata Netty, berdampak pada munculnya sikap kurang responsif terhadap imbauan vaksinasi. “Program vaksinasi booster yang telah dianggarkan pembiayaannya oleh pemerintah cenderung diabaikan masyarakat. Mereka telanjur termakan opini bahwa Covid-19 sudah hilang, untuk apa vaksinasi,” jelas Netty.

Menurut Netty, tingkat vaksinasi booster di daerah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon sebagai daerah pemilihannya masih di bawah 30 persen. “Sayangnya, masyarakat sudah tidak antusias untuk melakukan booster dengan alasan pandemi sudah hilang. Padahal sudah diming-imingi dengan pemberian minyak goreng,” kata Netty sembari meminta pemerintah bergegas melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi ledakan kasus yang mengkhawatirkan. ■ ann/aha

Anggota Komisi IX DPR RI
Netty Prasetiyani.
Foto: Munchen/nvl



Pengangkatan PPPK Timbulkan Kecemburuan pada Guru yang Tidak Lulus



Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan penyelenggara pendidikan di Deli Serdang. Foto: Hira/nvl

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng menyampaikan program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kalangan guru menimbulkan kecemburuan, khususnya kepada para guru yang tidak lulus ujian, terkait dengan kesejahteraannya. Ia menegaskan, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik guna meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.

“Kami berjuang untuk bagaimana pemerintah pusat melalui dana pendidikan 20 persen dari APBN itu

memberikan kesejahteraan untuk guru yang tidak lolos PPPK tetap harus dipikirkan karena mereka pernah mengajar hari ini dalam pengelolaan yang saat ini kan masih banyak guru yang tadi belum dapat,” ujar Agustina usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6).

Meski demikian, ia mengapresiasi upaya yang dilakukan Bupati Deli Serdang dan jajarannya yang hingga saat ini menanggung kesejahteraan guru yang belum lolos PPPK dengan menyisihkan dana APBD, BOS ataupun lainnya. “Bagaimana itu diproses ketika

APBD-nya *enggak* cukup? Ketua tim PKK itu pasti mengambil dana dari masyarakat. Tim penggerak PKK diminta untuk ikut mencari, bagaimana program pendidikan yang di luar sekolah dasar dan sekolah menengah yang formal, yang apa namanya reguler itu bisa tetap berjalan. Ini luar biasa,” apresiasi Agustina.

Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut menghasilkan beberapa catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti seperti kesejahteraan guru PPPK dan implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP). Agustina menilai, beberapa program yang digagas Mendikbud Ristek tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan para guru.

“Kita ke Deli Serdang melihat dari dekat proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar di SD dan SMP sambil bertemu dengan seluruh *stakeholder*. Nah dari sini kita melihat bahwa program guru penggerak dan sekolah penggerak ternyata membuat kecemburuan yang luar biasa ini yang mungkin harus dipikirkan oleh kawan-kawan di Kemendikbud ada pemikiran kembali,” lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Agustina pun berharap, implementasi dari kebijakan sekolah penggerak tidak pilih-pilih sekolah dengan membuka keran seluas luasnya bagi semua sekolah yang hendak berpartisipasi, terlebih dana yang dianggarkan pemerintah untuk itu cukup besar, sehingga sekolah-sekolah yang siap namun membutuhkan dana, berkesempatan juga untuk mendapat bantuan dari pemerintah tersebut.

“Mudah-mudahan pemerintah lebih konsen kepada amanat untuk program wajib belajar 9 tahun 3 mengalokasikan 20 persen APBN yang tahun ini ada Rp627 triliun itu lebih kepada menyelesaikan wajib belajar 9 tahun jadi anak-anak di usia sebelum 17 tahun,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV tersebut. ■ hal/sf

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Terkendala Akses Internet

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumatera Selatan masih terkendala dengan sarana penunjang, terutama *Information Technology* (IT). Dikarenakan Kurikulum Merdeka Belajar itu punya konsentrasi pengembangan pembelajaran yang memang fleksibel, tetapi kemudian ketergantungannya terhadap IT akses internet itu menjadi lebih kuat.

“Nah (akses internet) ini menjadi masalah bagi penyelenggara atau guru sekolah-sekolah di Palembang. Saya bisa membayangkan bagaimana dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) yang belum bisa akses internet. Dari segi konsep memang kurikulum ini menempatkan sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada guru bahkan tidak hanya terbatas pada buku, tapi yang ingin dipelajari itu adalah kehidupan itu sendiri yang luas,” kata Zainuddin saat mengikuti Kunspek Komisi X DPR ke Palembang, Sumsel, Senin (15/6).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, misalnya dalam kurikulum tersebut jika belajar tentang ekonomi dengan pendekatan *utility* memanfaatkan pasar, jadi para siswa-siswi langsung terjun ke pasar atau kalau tidak bisa disimulasikan saja. Nah, kalau mensimulasikan itu kan butuh teknologi, disinilah kelemahan dari implementasi

dari Kurikulum Merdeka Belajar ini yang dijalankan oleh sekolah penggerak.

“Kalau sekolah penggerak kita tahu telah dijalankan di sekolah-sekolah yang bagus, kalau evaluasinya yang disampaikan oleh Kemendikbud dengan menjalankan program Kurikulum Merdeka Belajar terjadi peningkatan prestasi belajar. Capaian literasi angkanya menjadi 570, sedangkan saat menerapkan kurikulum 2013 hanya mencapai angka 532, setelah terkena pandemi turun lagi menjadi 482. Dengan menerapkan kurikulum ini memang ada

peningkatan capaian literasi, akan tetapi hanya di sekolah-sekolah yang SDMnya sudah baik,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X ini.

Zanuddin menerangkan, untuk para guru yang menjalankan kurikulum merdeka belajar ini di Palembang sudah mendapatkan bimbingan, pendampingan atau pelatihan tetapi yang mereka keluhkan adalah sarana penunjangnya terutama adalah IT.

“Yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang masih belum bisa mencukupi guru yang kompeten dan sarpras dukungan sumber belajar itu yang perlu kita pelajari,” ujarnya. ■ jk/sf



Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki.
Foto: Jaka/nvl

Baleg DPR Sepakati RUU KIA Dibahas Bersama Pemerintah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) untuk dibahas lebih lanjut dalam pembicaraan bersama pemerintah. Pengesahan RUU tersebut untuk menjadi usulan RUU inisiatif tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Harmonisasi RUU KIA di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).

Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Nurdin dalam rapat tersebut menanyakan kepada peserta rapat untuk meminta persetujuan setelah bersama-sama mendengarkan pendapat dari semua fraksi.

“Selanjutnya kami minta persetujuan rapat. Apakah hasil harmonisasi RUU tentang kesehatan ibu dan anak dapat

”

SEJUMLAH PARTAI MENYETUJUI RUU KIA, DAN HANYA DUA PARTAI YANG MEMINTA PENDALAMAN TERHADAP RUU. ADAPUN PARTAI YANG MEMINTA PENDALAMAN YAKNI FRAKSI GOLKAR DAN FRAKSI PAN

di lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Nurdin, yang kemudian dijawab “Setuju” oleh seluruh peserta rapat dan dilanjutkan ketukan palu persetujuan.

Diketahui dalam rapat pleno ini, sejumlah partai menyetujui RUU KIA, dan hanya dua partai yang meminta pendalaman terhadap RUU. Adapun partai yang meminta pendalaman yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PAN. Adapun sebagai pengusul, Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada seluruh Fraksi, serta mengungkapkan bahwa catatan dari seluruh Fraksi tersebut menjadi hal yang penting dalam menyempurnakan batang tubuh dan norma norma dari RUU ketika pembahasan dengan pemerintah. ■ hal/sf



Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI saat menandatangani pengesahan RUU KIA untuk menjadi usulan RUU inisiatif DPR RI. Foto: Munchen/nvl

BAKN DPR Minta Ditjen Bea Cukai Tindak Tegas Penggunaan Cukai Palsu



Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat kunjungan lapangan BAKN ke PT Pura Barutama. Foto: Andri/Invi

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menindak tegas terkait penggunaan cukai palsu yang sampai sekarang masih terjadi pada banyak rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat.

“Antisipasi yang telah dilakukan Bea Cukai sendiri seperti apa, supaya kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan cukai palsu dan sampai sekarang masih terus terjadi?,” tanya Anis dalam kunjungan lapangan BAKN ke PT Pura Barutama di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/6). Kunjungan ini

dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI atas LHP BPK RI terhadap pengelolaan cukai hasil tembakau.

Anggota Komisi XI DPR RI itu juga mengingatkan Bea Cukai agar membuat

”

SAYA SANGAT MIRIS MENDENGAR LAPORAN DARI PIHAK PENGELOLA INDUSTRI ROKOK YANG MERASA TIDAK PERNAH MENDAPKANKAN BIMBINGAN ATAUPUN EDUKASI DARI PEMERINTAH.

kebijakan khusus dan menindaklanjuti kasus cukai palsu yang kerap terjadi. Ia juga mengingatkan agar Peruri memiliki mekanisme khusus ketika ditemui kerusakan pada pita cukai yang asli. “Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Bea Cukai agar peristiwa serupa tidak terulang,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Anis menegaskan, seharusnya pemerintah selayaknya membuat peraturan yang lebih adil kepada industri rokok dengan memberikan pembinaan yang baik. “Saya sangat miris mendengar laporan dari pihak pengelola

industri rokok yang merasa tidak pernah mendapatkan bimbingan ataupun edukasi dari pemerintah. Sementara Ditjen Bea Cukai didesak dan dievaluasi jika ada penurunan pendapatan cukai tembakau. Kurangnya pembinaan, menjadi satu hal yang perlu dicermati,” tegas Anis.

Anis juga menekankan perlunya Ditjen Bea Cukai memiliki antisipasi atas temuan BPK tentang adanya pita cukai palsu. Beredarnya cukai palsu akan berpengaruh pada pendapatan negara karena dipastikan cukai palsu tidak akan masuk ke dalam pendapatan negara. “Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu memiliki antisipasi dan sikap yang telah disiapkan jika kasus cukai palsu ini terus ditemukan,” katanya. ■ man/sf

BURT DPR Minta PT KAI Perhatikan Layanan Luar Jawa

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani menilai pelayanan Kereta Api Indonesia (KAI) secara bertahap alias *step by step* sudah mulai terlihat hasilnya dan cukup bagus, akan tetapi selain pelayanan di Jawa, PT KAI (Persero) ia harapkan juga harus memperhatikan pelayanan di luar Pulau Jawa.

“Kinerja dan pelayanan KAI sudah mulai memperbaiki diri dan sudah

mulai terlihat hasilnya, menurut saya cukup bagus hanya saja, KAI tidak boleh memperhatikan pelayanan-pelayanan yang hanya di Jakarta atau di Jawa, tetapi di luar Jawa masih banyak yang masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat,” jelas Irma usai dialog BURT DPR RI dengan Dirut PT KAI beserta jajarannya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (11/6).

Selain pelayanan, Irma juga menyoroti KAI di luar Jawa yang belum tersentuh, contohnya di Sumatera. Legislator dapil Sumatera Selatan II itu berharap daripada pemerintah fokus kepada kereta cepat Jakarta-Bandung, akan lebih bermanfaat mendorong



Anggota BURT DPR RI Irma Suryani. Foto: Ariel/nvl

rute di Jakarta-Surabaya atau Lampung ke Meulaboh, Aceh.

Sebab menurut Irma, potensi rute tersebut tidak hanya akan mengurangi biaya transportasi yang tinggi, namun juga membuka lapangan pekerjaan di setiap stasiun dan tentunya nanti akan ada pertumbuhan ekonomi. “KAI Jangan hanya mempercantik Jawa. Tetapi juga harus melihat kebutuhan di wilayah seluruh Indonesia, seperti di Sumatera,” jelas politisi Partai NasDem tersebut lebih lanjut.

Adapun berdasarkan nota kesepahaman kerja sama keprotokolkan dengan PT KAI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT KAI (Persero) pada 22 Desember 2021 silam, Irma lanjut menjelaskan melalui kunjungan kerja BURT DPR RI ke Stasiun Tawang Semarang ini, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan PT KAI dalam menghadapi atau memberikan pelayanan kepada para



POTENSI RUTE TERSEBUT TIDAK HANYA AKAN MENGURANGI BIAYA TRANSPORTASI YANG TINGGI, NAMUN JUGA MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN

Anggota DPR RI beserta keluarga yang tidak menggunakan pesawat atau tidak membawa kendaraan sendiri.

“Sekarang sudah ada jalan tol bagus, yang kami tanyakan kepada mereka sejauh mana KAI mempersiapkan fasilitas, bukan kami ingin diistimewakan, karena semua harga semuanya sama hanya saja yang kami butuhkan kesiapan ketika misalnya kami mendapat tugas perangkat dalam kondisi *urgent*, itu yang kita minta bagaimana kesiapan KAI dalam mempersiapkan untuk (pelayanan) Anggota DPR RI,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI itu. ■ afr/aha

Setjen DPR Dukung Penuh DPR Jadi Tuan Rumah P20

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendukung penuh DPR RI menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan ‘The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit’ (P20) pada 6-7 Oktober 2022 mendatang. Memperoleh estafet kepercayaan tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan agar setiap elemen Setjen DPR RI saling menguatkan kerjasama untuk menyukseskan P20.

“Sebagai penunjang tugas dan fungsi DPR RI, Setjen DPR RI berkomitmen mendukung penyelenggaraan P20, Baik dari sisi teknis maupun dari sisi substantif. Perlu digaris bawahi, bahwa keberhasilan konferensi ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari berbagai pihak untuk saling membangun komunikasi dan kerja sama dengan para stakeholder,” tutur Indra dalam kegiatan *Executive Briefing* bersama jajaran Eselon I Sekretariat Jenderal DPR RI di Command Center DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Selaras dengan tema G20 yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’, jelas Indra, P20 akan mengusung tema yang bertajuk ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’. Nantinya, tema ini akan merepresentasikan semangat guna memperkuat interaksi dan kerjasama antar parlemen G20 untuk membahas sejumlah su yang menjadi agenda G20.

Demi mengawali sekaligus membumikan gaung P20 sebagai rangkaian dari G20, Setjen DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengundang Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik



Sekjen Indra Iskandar DPR RI bersama Pejabat Setjen DPR RI usai kegiatan *Executive Briefing* untuk penyelenggaraan ‘The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit’ (P20). Foto: Novel/nvl

Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antarlembaga Muhsin Syihab, dan Staf Khusus Ketua DPR RI Toferry Primanda Soetikno untuk mensosialisasikan P20.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Endah Tjahjani Dwirini menekankan P20 adalah forum vital yang akan melahirkan berbagai perspektif parlemeter untuk menyelesaikan isu yang menjadi perhatian para negara G20. “Sebelumnya DPR RI cukup sukses menyelenggarakan IPU 144. Kami ingin DPR RI mengulang kesuksesan itu, bahkan ingin lebih sukses untuk P20,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dirinya menjelaskan bahwa P20 turut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang menjadi pertimbangan DPR RI dalam pembahasan UUD, pengalokasian anggaran, dan akuntabilitas pengawasan. Sehingga, melalui penyelenggaraan P20 di Indonesia, DPR RI bisa memastikan Indonesia memperoleh kebijakan yang lebih baik sekaligus implementatif. ■ ts/aha

”

SETJEN DPR RI BERKOMITMEN Mendukung Penyelenggaraan P20, Baik dari Sisi Teknis maupun dari Sisi Substantif.

Tren Pariwisata Berubah, BK DPR Gelar FGD UU Kepariwisataan

Sering berjalannya waktu, terjadi perubahan pandangan atas dampak pariwisata di suatu negara. Di Indonesia, pariwisata memiliki peran besar terhadap ekonomi nasional. Untuk itu, perubahan tren pariwisata nasional yang terus terjadi perlu didukung penuh berbagai pihak, guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Berangkat dari latar belakang ini, Pusat Penelitian Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) bertema 'Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan'. Pasalnya, UU Kepariwisataan ini dinilai sudah tidak relevan.

Bertempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) seminar ini dihadiri oleh Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Inosentius Samsul; Akademisi IPB, Prof. Syamsul Maarif; Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Chrispianus Mesima; Dosen Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Inosensius Sutam; dan perwakilan LSM, Yoseph Sampurna Nggarang. Seminar ini guna mendapat masukan dari pakar dan masyarakat untuk memperkaya BKD

sebagai *supporting system* lembaga DPR dalam penyusunan Naskah Akademi RUU.

"UU Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 sudah 13 tahun menjadi payung hukum tata kelola kepariwisataan. Padahal, tren pariwisata terus berubah dan perkembangan teknologi saat ini juga mengharuskan dunia pariwisata untuk mampu beradaptasi dengan *platform* digital.

Karenanya diskusi ini penting sebagai bahan masukan kami," kata Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dalam sambutannya, Jumat (10/6).

Selain itu, lanjut Sensi, sapaan akrabnya, dari hasil diskusi BK DPR

RI dengan Komisi X, pihaknya juga mencatat ada beberapa permasalahan di UU Kepariwisataan. Misalnya masalah regulasi antara pemerintah pusat-daerah, kelembagaan pariwisata, tata kelola, serta sumber daya manusia yang belum optimal sehingga perlu diperbaiki. "Untuk itu kami butuh masukan bapak-bapak untuk kami adopsi nanti dalam pembahasan NA (naskah akademik). Saya juga berharap bapak-bapak tidak berhenti di sini, tetapi juga turut mengawal," harapnya.

Akademisi IPB Prof. Syamsul Maarif mengatakan manajemen pembangunan dan pengembangan pariwisata menuju pariwisata berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Untuk itu strategi pembangunan berkelanjutan perlu diperhatikan, seperti

pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang," katanya. ■ rmm/sf

Kepala BK DPR RI
Inosentius Samsul.
Foto: Ria/invl



BAKN DPR Harap Penerimaan Negara dari Cukai Dapat Lebih Optimal

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya berharap penerimaan negara dari cukai dapat lebih optimal dibandingkan kondisi saat ini. Menurutnya, pendapat negara dari sektor cukai mampu mencapai Rp189 triliun. Karena itu, ia meminta jika terjadi ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal itu dapat diminimalisasi ke depannya.

“Kita berharap kalau bisa *sih*, bahkan seharusnya pendapatan cukai bisa dioptimalkan lagi,” ujar Wahyu di sela-sela memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Gudang Garam, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (14/6). Salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cukai tersebut adalah melalui penyederhanaan tarif cukai tembakau.

Penyederhanaan tarif cukai tembakau adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan angka perokok. Penyederhanaan tarif yang dilakukan tahun ini dari 10 *layer* menjadi delapan *layer*. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan efektif untuk membuat harga

rokok tidak murah dan tidak membuat banyak pilihan karena banyaknya golongan pada tiap jenis rokok.

“Kita ingin dapatkan masukan dari para produsen rokok apabila ke depannya ada penyederhanaan tarif rokok. Oleh karena dengan penyederhanaan tarif rokok itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara dari cukai tembakau,” jelas Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020.

Nilai tersebut naik 3,67 persen dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74 persen dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok. ■ rdn/sf



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. Foto: Ridwan/nvl

BURT DPR Pantau Pelayanan Keprotokolanan Daop 8 Surabaya



Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi bertukar cenderamata dengan direksi PT KAI. Foto: Sofyan/mvl

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Johan Budi memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI melakukan pengawasan dan memantau pelaksanaan keprotokolanan yang dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), khususnya di Daop 8 Surabaya. Diketahui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI telah melaksanakan perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT KAI pada 22 Desember 2021 lalu, terkait dengan pelayanan keprotokolanan kepada Anggota DPR RI.

“Kita ke Stasiun Pasar Turi dalam rangka mengecek secara langsung bagaimana protokoler yang didapat Anggota DPR terkait dengan penggunaan kereta api. Kita ada MoU antara PT KAI dengan Setjen DPR.

Dimana salah satu yang difokuskan adalah bagaimana melayani 575 Anggota DPR ketika menggunakan moda transportasi kereta api. Kita dijelaskan (oleh jajaran KAI), ada penyambutan (dari petugas), ada (layanan) parkir, dan lain sebagainya,” kata Johan usai memimpin pertemuan BURT DPR RI dengan Direksi KAI dan jajaran Daop 8 Surabaya, di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/6).

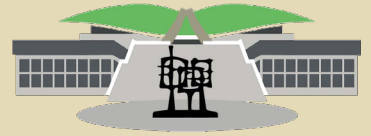
Dalam kesempatan itu, Johan dan seluruh Anggota BURT sepakat bahwa KAI mengalami transformasi yang luar biasa. Di antaranya terkait ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api, kebersihan, hingga kenyamanan penumpang yang sangat meningkat. Bahkan Johan mengakui naik kereta sudah seperti naik pesawat kelas bisnis. Sejumlah Anggota BURT pun turut mengapresiasi transformasi KAI. Namun terkait layanan protokoler

ini, Johan memberikan sejumlah catatan, dalam hal ini sosialisasi kepada seluruh petugas KAI.

“Concern saya terhadap KAI, bagaimana pengetahuan (terkait layanan protokoler kepada Anggota DPR RI) juga didapat oleh *front office*. Itu penting sekali, karena selevel direksi, itu mungkin tahu MoU-nya. Tapi bagaimana dengan yang melayani secara langsung. Ada jalan tengah saat pertemuan dengan Dirut KAI di Semarang, kita diberi *contact person*. Mungkin dengan yang (protokoler) di DPR, ada kerja sama. Dengan pertemuan ini (dan pertemuan dengan

Dirut KAI pada kunjungan kerja sebelumnya), semakin meyakinkan kita ke depan (KAI akan) mempermudah Anggota DPR,” yakin politisi PDI-Perjuangan itu.

Menanggapi berbagai masukan dari BURT DPR RI, Direktur Pengelolaan Sarana PT KAI Eko Purwanto mengatakan pihaknya akan memperluas sosialisasi terkait pelayanan protokoler kepada Anggota DPR RI. Pihaknya juga telah menyiapkan pelayanan di stasiun dan ketersediaan tempat duduk di gerbong kereta. Dalam hal ini jika ada kebutuhan tempat duduk di kereta api bagi Anggota DPR RI dan pejabat negara lainnya yang mendadak melakukan perjalanan dinas. Eko memastikan pihaknya juga akan menjalankan komunikasi dengan protokoler di DPR, sehingga KAI bisa memberikan pelayanan transportasi kereta api optimal kepada Dewan. ■ sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin pelantikan empat Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 di ruang rapat Paripurna DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (14/6). Foto: Tim/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bersama pejabat di Setjen DPR RI saat melakukan submit tahap III Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Foto: Andri/nvl



Persekutuan Doa Oikumene (PDO) MPR/DPR/DPD RI menggelar kegiatan bakti sosial di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (9/6). Foto: Jaka/nvl

